

**RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

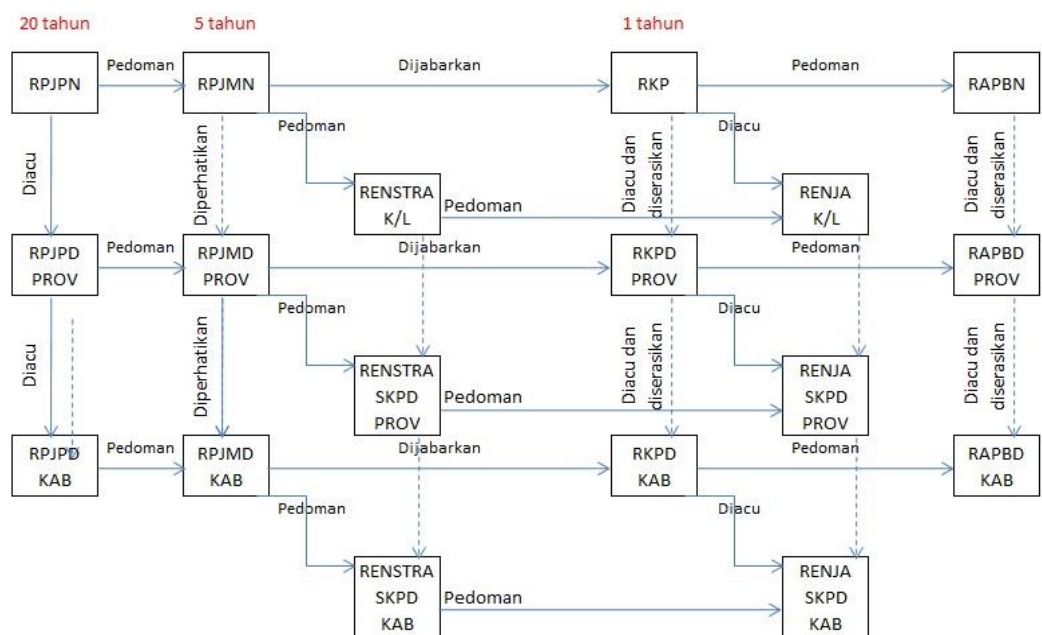
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok

fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 2) Kondisi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 4) Data Pokok Pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

**b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis

indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun lalu berdasarkan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan



dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;**

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTU

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN**  
**2022**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2023 terhadap target di tahun 2024.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022 Rp(DPPA)	REALISASI 2022 Rp	CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	
1	2	11	21	22	23	28
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.570.598.793	13.738.491.252	100,00	78,19	
				100,00		
				100,00		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.164.733.300	1.957.210.085	100,00	90,41	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	965.302.500	500.518.550	100,00	51,85	

4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1.359.226.000	1.015.972.377	100,00	74,75	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>					
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	206.505.000	191.370.600	100,00	92,67	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.509.000	171.740.050	100,00	83,16	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	112.986.000	103.316.300	100,00	91,44	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	112.986.000	98.492.800	100,00	87,17	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>					
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40.000.000	12.100.000	63,33	30,25	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	44.000.000	10.000.000	50,00	22,73	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.000.000	5.200.000	56,67	11,82	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52.000.000	11.300.000	70,00	21,73	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>					
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.625.044.500	2.489.643.350	100,00	94,84	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	350.142.151	326.180.000	100,00	93,16	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	219.744.000	215.621.860	100,00	98,12	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>					
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	252.166.000	229.433.300	100,00	90,99	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.418.387.000	1.330.441.000	100,00	93,80	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>					
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.396.867.342	5.069.950.980	100,00	68,54	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program A1</b>				<b>90,59</b>		
				<b>Predikat Sangat Tinggi</b>		
<b>4.02.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.895.534.220</b>	<b>29.021.571.919</b>	<b>100</b>	<b>93,93</b>	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.053.701.052	2.878.311.934	100,00	94,26	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.500.000	25.596.500	100,00	86,77	

4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.093.000	22.115.000	100,00	88,13	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.500.000	20.314.000	100,00	99,09	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.720.000	30.492.000	100,00	90,43	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	67.255.000	100,00	67,26	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	782.236.000	779.242.453	100,00	99,62	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	9.310.000	100,00	71,62	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	100.289.524	100,00	74,29	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	641.521.358	598.076.690	100,00	93,23	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	884.963.400	547.255.438	100,00	61,84	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.500.000	122.042.000	100,00	87,49	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.542.000	66.090.000	100,00	69,17	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.200.000	20.129.500	100,00	83,18	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>					
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.916.457.910	22.814.646.880	100,00	95,39	
4.02.01.2.15.02	Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	561.000.000	535.873.000	100,00	95,52	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	57.431.000	29.918.500	100,00	52,09	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>					
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.168.500	72.613.500	100,00	72,49	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	282.000.000	282.000.000	100,00	100,00	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program A2</b>				<b>100,00</b>		
				<b>Predikat</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
<b>Jumlah</b>		<b>48.466.133.013</b>	<b>42.760.063.171</b>			
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan</b>				<b>95,29</b>	88,23	



Predikat		Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Program		100,00
Predikat		Telah Tercapai
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan dilakukan dengan cermat dan pelaksanaan tugas dilakukan penuh tanggung jawab.		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa kegiatan yang telah direncanakan, terutama yang melibatkan pihak ketiga, untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka tercapainya target kinerja. Terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa agar segera dilaksanakan.		
Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar dilakukan secara lebih cermat dan matang dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada.		

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berupa:

**1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%)**

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:
  - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - b) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - c) Penyediaan bahan logistic kantor
  - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - f) Fasilitas kunjungan tamu
  - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - h) Penyediaan jasa surat menyurat

- i) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - j) Penyediaan jasa layanan umum kantor
  - k) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - l) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - m) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
  - n) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya
  - o) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
  - p) Penyelenggaraan pakaian dinas dan atribut DPRD
  - q) Pelaksanaan medical check up DPRD
  - r) Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
  - s) Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD
- 2) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi:
- a) Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - b) Penyelenggaraan kajian perundang-undangan
  - c) Fasilitas penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik
  - d) Pembahasan KUA dan PPAS
  - e) Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS
  - f) Pembahasan APBD
  - g) Pembahasan APBD perubahan
  - h) Pendalaman tugas DPRD
  - i) Publikasi dan dokumentasi dewan
  - j) Penyediaan tenaga ahli fraksi
  - k) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
  - l) Pelaksanaan reses
  - m) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD

**Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%)**

- 1) Program pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi:
  - a) Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
  - b) Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur
  - c) Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
  - d) Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian

Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

- a) Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak teragendakan (dibuat *time schedule*).
- b) Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.
- c) Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD  
Kabupaten Temanggung

No.	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2022 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	50	60	70	80	90	73,08	90,48	80,00	88,89	33,33	88,89	AT
2	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	15,38	14,28	10,00	37,50	0	37,50	UK
3	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	99,82	100	100,00	100	30,93	100	TT
4	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	54	55	56	57	58	74,83	78,86	82,16	100	85,41	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2<sub>[AEV1]</sub>, terdiri dari:
  - 1) Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana.
  - 2) Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1<sub>[AEV2]</sub>, terdiri dari yaitu persentase raperda yang disahkan tepat waktu.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1<sub>[AEV3]</sub>, terdiri dari:
  - a. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dilakukan satu tahun sebelum masuk kedalam Propemperda dan Raperda inisiatif merupakan konsep rancangan Peraturan Daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah substansi materi Raperda yang belum terfasilitasi oleh Provinsi yang menangani bidang hukum menjadikan terhambat pembahasannya.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk difasilitasi atau diharmonisasi dan disinkronasi oleh lembaga yang menangani bidang peraturan perundangan di tingkat Provinsi.

### **2.2.2. Data Pokok**

Data Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

#### **1. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD berdasarkan Propemperda atau di luar

Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPERDA yang disahkan tepat waktu adalah jumlah RAPERDA yang dibahas dan disahkan tepat waktu di DPRD dibandingkan/dibagi dengan RAPERDA yang disiapkan dan disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD.

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.1.  
 Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu<sup>[AEV4]</sup>  
 Tahun 2018 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah PERDA yang ditetapkan	18	15	19	19	16
2.	Jumlah RAPERDA yang diajukan	18	16	26	21	18
	<b>% RAPERDA yang disahkan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>93,75</b>	<b>73,08</b>	<b>90,48</b>	<b>88,89</b>

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 88,89%, karena sampai dengan triwulan IV tahun 2022 jumlah PERDA yang ditetapkan adalah sebanyak 16 PERDA dari jumlah RAPERDA yang diajukan sebanyak 18 RAPERDA.

Pada tahun 2022 terdapat 2 RAPERDA yang belum ditetapkan menjadi PERDA padahal sudah diajukan ke DPRD.

Adapun daftar RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.  
 Daftar PERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2022

NO.	NAMA RAPERDA
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042
2.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3.	Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
4.	Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh
5.	Keterbukaan Informasi Publik
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

7.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
8.	Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9.	Pencegahaan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kabupaten Temanggung
11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 12 Tahun 2017 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung
13.	Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren
14.	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
15.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023
17.	Bangunan Gedung
18.	Sewa Rumah Susun Sederhana

## **2. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda**

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Perda Inisiatif adalah Peraturan Daerah yang yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda, dengan persetujuan bersama Bupati yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari kunjungan kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat

dengar pendapat umum. Setiap aspirasi masyarakat harus mampu diserap oleh DPRD yang selanjutnya dapat diolah menjadi suatu rancangan peraturan daerah.

Definisi jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda yaitu perbandingan antara jumlah perda inisiatif dengan jumlah raperda yang dibahas di DPRD.

Rumus penghitungan dari persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda adalah : jumlah peraturan daerah inisiatif dibagi jumlah raperda dikali 100%.

Salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Peraturan Daerah, maka perumusan angka tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh DPRD dengan mengajukan rancangan perda inisiatif di dalam Propemperda.

Realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda dari tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.  
 Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda  
 Tahun 2018 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah peraturan daerah inisiatif	3	4	3	2	5
2.	Jumlah raperda	16	26	21	20	18
	%	<b>18,75</b>	<b>15,38</b>	<b>14,28</b>	<b>10,00</b>	<b>27,78</b>

*Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2022, terdapat 5 Peraturan Daerah Inisiatif (usulan Komisi A DPRD, Komisi B DPRD, Komisi C DPRD, dan Komisi D DPRD) dari jumlah Raperda sebanyak 18 Raperda, sehingga persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda tahun 2022 sebesar 27,78%.

### **3. Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana**

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan

keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana adalah jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.  
Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2018 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan	937	568	978	893	1332
2.	Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan	997	569	978	893	1332
	<b>% kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana</b>	<b>93,98</b>	<b>99,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10</b>

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2022, persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tercapai sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2022 jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sebanyak 1332 kegiatan, sedangkan jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 1332 kegiatan.

#### **4. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan**

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah, penyerapan aspirasi/reses yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD

Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2018 s/d 2022 (sampai dengan tahun 2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.  
Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan  
Tahun 2018 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan</b>	<b>164</b>	<b>220</b>	<b>373</b>	<b>304</b>	<b>357</b>
	- Rapat Paripurna	20	27	30	26	26
	- Rapat Komisi	64	50	35	44	44
	- Rapat Pansus	10	50	44	35	35
	- Rapat Badan Kehormatan	1	1	1	1	1
	- Rapat Badan Anggaran	8	10	15	9	9
	- Rapat Badan Musyawarah	7	5	9	8	8
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	2	2	5	2	2
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	52	75	144	44	44
	- Penyerapan aspirasi/reeses			90	135	135
<b>2.</b>	<b>Jumlah kegiatan DPRD</b>	<b>389</b>	<b>294</b>	<b>473</b>	<b>370</b>	<b>405</b>
	- Rapat Paripurna	31	27	30	26	26
	- Rapat Komisi	93	60	66	76	76
	- Rapat Pansus	64	66	57	44	44
	- Rapat Badan Kehormatan	2	2	1	2	2
	- Rapat Badan Anggaran	13	11	19	12	12
	- Rapat Badan Musyawarah	13	9	12	11	11
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	4	4	5	2	2
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	169	115	193	62	62
	- Penyerapan aspirasi/reeses			90	135	135
<b>3.</b>	<b>% Kegiatan DPRD yang dipublikasikan</b>	<b>42,16</b>	<b>74,82</b>	<b>78,86</b>	<b>82,16</b>	<b>88,14</b>

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2022 adalah sebesar 88,15% dikarenakan jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 357 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD sebanyak 405 kegiatan. Hal ini didukung dengan adanya publikasi

kegiatan DPRD di Temanggung TV dan Instagram Humas DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 2.8. dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 – 2022 persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dilandasi kesadaran pentingnya publikasi, serta berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya publikasi maka hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi.

Kendala dalam pengelolaan publikasi adalah kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi, mengingat banyaknya kegiatan kedewanan yang intensitasnya tinggi dan tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang sama.

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Besarnya Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya.
2. Masih rendahnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi masih belum optimal.

Adapun saran yang diperlukan guna mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal penyusunan produk hukum daerah.



2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi dalam hal penyusunan naskah akademik dan kajian.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan nomenklatur kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.11  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Keterangan
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	3.096.673.900		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	3.096.673.900	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	27.602.300		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	27.602.300	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	22.550.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	22.550.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	37.092.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	37.092.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	110.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	110.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	714.959.300		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	714.959.300	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	0	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	8.800.000		Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	8.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	121.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	121.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	689.173.494		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	689.173.494	
							Pengadaan Pakaian Dinas Sekretariat DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pakaian dinas Sekretariat DPRD	28	15.000.000	Perlunya pengadaan pakaian dinas Setwan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	659.959.740		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	659.959.740	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	85.000.000		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	85.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	194.813.849		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	194.813.849	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	30.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	30.000.000	

	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>						<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>					
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	27.727.605.301		Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	27.727.605.301	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	452.100.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	452.100.000	
	Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terksananya medical check up untuk DPRD	45	99.000.000		Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terksananya medical check up untuk DPRD	45	99.000.000	<b>Adanya keanikan Anggaran Medical Checkup</b>
	<b>Pelayanan Administrasi DPRD</b>						<b>Pelayanan Administrasi DPRD</b>					
	Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	110.185.350		Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	110.185.350	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	310.200.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	310.200.000	
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>						<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>					
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>						<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>					
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	2.139.206.630		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	2.139.206.630	
	Hearing	Kab. Temanggung	Terlaksananya hearing	5	250.000.000		Hearing	Kab. Temanggung	Terlaksananya hearing	5	250.000.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	525.302.500		Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	525.302.500	
	Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	Kab. Temanggung	Terlaksananya survey kepuasan publik	1	400.000.000		Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	Kab. Temanggung	Terlaksananya survey kepuasan publik	1	500.000.000	<b>Perlunya penambahan anggaran survey publik</b>
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	1.099.148.600		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	1.099.148.600	
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>						<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>					

	Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	206.505.000		Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	206.505.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	206.505.000		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	206.505.000	
	Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	112.986.000		Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	112.986.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	112.986.000		Pembahasan APBD Perubahan	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	112.986.000	
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>						<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>					
	Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	40	44.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	40	44.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	44.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	44.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	44.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	44.000.000	
	Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	52.000.000		Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	52.000.000	
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>						<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>					
	Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	3.275.044.500		Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	3.275.044.500	
	Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	208.142.151		Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	208.142.151	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	222.171.600		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	222.171.600	

	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>						<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>					
	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pokir DPRD	2	142.673.300		Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pokir DPRD	2	142.673.300	
	Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	1.560.225.700		Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	1.560.225.700	
	<b>Fasilitasi tugas DPRD</b>						<b>Fasilitasi tugas DPRD</b>					
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	7.244.867.342		Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	7.244.867.342	<b>Perlunya kenaikan anggaran</b>
					<b>46.986.332.625</b>						<b>47.418.901.625</b>	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.12  
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	<b>NIHIL</b>				

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD antara lain :

1. Dioptimalkannya website DPRD Kabupaten Temanggung sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait regulasi dan kegiatan kedewanan lebih cepat.
2. Dibuatnya Instagram Humas DPRD Temanggung, yang sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, sehingga menjadikan Sekretariat DPRD Temanggung dan DPRD Temanggung semakin membumi dimata masyarakat Temanggung. Harapannya masyarakat bisa ikut memanfaatkan akun tersebut, sebagai bentuk interaksi langsung antara masyarakat dengan wakil-wakil mereka yang ada di lembaga DPRD.

## 2.7. Penghargaan

Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s/d 2021, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13  
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019 - 2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Peringkat Daerah Pengampu
	<b>NIHIL</b>			



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Tidak berbeda dengan Lembaga di atasnya dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan pasal 420 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan Provinsi. Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hampir sama dengan DPR RI maupun DPRD Provinsi Jawa Tengah, demikian juga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberkan fasilitasi terhadap agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
2. Menyiapkan administrasi keuangan.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

4. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD**

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Presentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	90	90	90
			Presentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	%	95	95	95
			Presentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	100	100
			Presentase kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100

Kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Sekretariat DPRD Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			( + / - )
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.933.016.539		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	3.096.673.900	163.657.361
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.992.630		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	992.630
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.190.690		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	3.190.690
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.998.900		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.500.000	12.498.900
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	37.092.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	15.000.000	22.092.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	110.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu	110.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	714.959.300		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	449.963.000	264.996.300
	Pakaian Dinas ASN	20.000.000		Pakaian Dinas ASN	0	20.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.929.220		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	850.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.146.920		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
	Penyediaan jasa surat menyurat	8.800.000		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	121.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	800.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	667.920.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	110.000.000	11.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.173.494	21.253.494
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	660.212.190			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.959.740	252.450
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	105.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000	20.000.000
	Pembangunan Gedung Arsip	0					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	35.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	15.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	5.000.000
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>				<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	24.302.291.519			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	27.727.605.301	3.425.313.782
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	432.410.440			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	452.100.000	19.689.560
	Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	90.000.000			Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	99.000.000	9.000.000
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>				<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		
					Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	710.000000	710.000.000
	Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	110.004.070			Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	110.185.350	181.280
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	310.000.000			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	310.200.000	200.000
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>				<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>				<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.766.453.910			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	750.000.000	2.016.453.910
	Hearing	350.000.000					
	Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	357.832.750			Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	325.302.500	32.530.250
	Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	0			Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	400.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	1.108.140.532			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	700.000.000	408.140.532
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>				<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		
	Pembahasan KUA dan PPAS	252.200.408			Pembahasan KUA dan PPAS	206.505.000	45.695.408
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	252.200.408			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.509.000	45.691.408
	Pembahasan APBD	126.100.253			Pembahasan APBD	112.986.000	13.114.253
	Pembahasan APBD Perubahan	126.100.253			Pembahasan APBD Perubahan	112.986.000	13.114.253
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>				<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>		
	Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	44.000.000			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	22.000.000	22.000.000
	Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	48.400.000			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	22.000.000	26.400.000

Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	48.400.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	22.000.000	26.400.000
Penawasan urusan bidang perekonomian	57.200.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30.000.000	27.200.000
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		
		Orientasi DPRD	435.037.500	
Bimbingan Teknis DPRD	2.777.548.952	Pendalaman Tugas DPRD	2.125.007.000	652.541.952
Publikasi dan dokumentasi dewan	228.956.336	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	208.142.151	20.814.185
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	241.487.400	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	222.171.700	19.315.700
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		
Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	142.673.000	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	75.000.000	67.673.000
Pelaksanaan Reses	1.560.241.100	Pelaksanaan Reses	1.418.387.000	141.854.100
<b>Fasilitasi tugas DPRD</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>		
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	7.639.354.089	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.860.411.342	1.778.942.747
<b>JUMLAH</b>	<b>54.446.493.570</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>48.442.805.978</b>	<b>10.051.000.145</b>

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024



Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp 10.051.000.145,-

Tabel 4.2  
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Temanggung  
Tahun 2024

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
					Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	2.512.628.761	2.933.016.539	
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	Bulan	10.000.000	10.992.630	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	Bulan	27.602.300	28.190.690	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	22.550.000	32.998.900	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	Bulan	15.000.000	37.092.000	
					Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	Bulan	110.000.000	110.000.000	
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	Bulan	449.963.000	714.959.300	
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>							

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	Paket		203.929.220[AEV5]	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	Paket		95.146.920	
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
					Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	Bulan	8.000.000	8.800.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	Bulan	110.000.000	121.000.000	
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	Bulan	689.173.494	667.920.000	
					Pakaian Dinas ASN	Kab. Temanggung	Pakaian dinas ASN	28	Stel	0	20.000.000	
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	Bulan	659.959.740	660.212.190	
					Pembangunan Gedung Arsip	Kab. Temanggung	Tersedianya Gedung arsip	12	Bulan	0		
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	Bulan	85.000.000	105.000.000	

Kode Rekenig					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	Bulan	125.000.000	35.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	Bulan	25.000.000	15.000.000	
					<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>							
					Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	Bulan	25.332.948.480	24.302.291.519	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	orang	590.999.900	432.410.440	
					Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terksananya medical check	45	Orang	90.000.000	90.000.000	
					<b>Pelayanan Administrasi DPRD</b>							
					Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	Hari	100.068.500	110.004.070	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	Bulan	282.000.000	310.000.000	
					<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>							
					<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>							

					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	Bulan	2.194.634.800	2.766.453.910	
Kode Rekening					Urusab/Bidang Pemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Hearing	Kab. Temanggung	Terlaksananya hearing DPRD	5	Kali	0	350.000.000	
					Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	Paket	325.302.500	357.832.750	
					Survey Kepuasan Terhadap Kinerja DPRD	Kab. Temanggung	Terlaksananya survey kinerja DPRD	1	Paket	0	0	
					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	Paket	700.000.000	1.108.140.532	
					<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>							
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	Kegiatan	206.505.000	252.200.408	
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Kegiatan	206.505.000	252.200.408	
					Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	Kegiatan	112.986.000	126.100.253	
					Pembahasan APBD Perubahan	Jateng – DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	Kegiatan	112.986.000	126.100.253	
					<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>							
					Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	40	Hari	44.000.000	44.000.000	

					Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	Hari	44.000.000	48.400.000	
Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
Urs	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	Hari	44.000.000	48.400.000	
					Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	Hari	52.000.000	57.200.000	
					<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>							
					Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	Kali	2.625.044.500	2.777.548.952	
					Orientasi DPRD			1	Kali	435.037.500		
					Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	Bulan	166.337.151	228.956.336	
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	Bulan	222.171.700	241.487.400	
					<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>							
					Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pokok pikir DPRD	2	Kali	125.000.000	142.673.000	
					Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	Kali	1.472.211.000	1.560.241.100	
					<b>Fasilitasi tugas DPRD</b>							
					Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	Bulan	10.905.768.000	7.639.354.089	
										<b>51.717.637.326</b>	<b>54.446.493.570</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat DPRD itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat DPRD dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 42.760.063.171,- (83,62%), belanja Modal sebesar Rp. 105.000.000,- (93,88%), sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 48.442.805.978,- yang terdiri dari 2 program antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah dan program pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Sekretariat DPRD dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika

menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2022  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**AGUS MUNADI, S Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681210 199001 1 001